

Reklamasi Pantai: Untuk Siapa?

(Untuk Hari Bumi 22 April)

Oleh
Muhammad Arsyad



Dosen Fisika FMIPA UNM
Makassar dan Peneliti Karst

Simak Juga di
www.tribun-timur.com

ada komentar soal
opini ini, kirim
ke facebook
tribun timur berita
online makassar

BULAN April ini, Kota Makassar masih diguyur hujan dengan intensitas rendah dan cenderung lebih rendah daripada tahun lalu. Walaupun intensitas dan waktu durasinya agak rendah, bukan berarti genangan air tidak ada. Malahan semakin mudah dijumpai di sudut kota dan cuaca di Makassar tergolong tidak bersahabat dan cenderung memberikan anomali. Tulisan ini mencoba untuk memberikan apresiasi terhadap bumi, tempat kita berdiam, memaknai hidup dan kehidupan, sekaligus untuk memperingati 22 April sebagai hari bumi yang diperingati secara internasional.

Peringatan Hari Bumi setiap tanggal 22 April merupakan hasil kerja keras Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson pada tahun 1970 seorang pengajar lingkungan hidup. Tanggal ini bertepatan pada musim semi di Northern Hemisphere (belahan Bumi utara) dan musim gugur di belahan Bumi selatan.

Ke depan, isu lingkungan mempunyai lima tantangan bagi umat manusia. Kelima tantangan (Salim, 2010) tersebut, yakni: 1) penyelamatan air dari eksploitasi secara berlebihan dan pencemaran yang meningkat, 2) merosotnya kualitas tanah serta hutan akibat tekanan penduduk dan eksploitasi besar-besaran untuk keperluan pembangunan, 3) menciutnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat lingkungan hidup, 4) perubahan iklim, dan 5) meningkatnya jumlah kota-kota berpenduduk banyak.

Dari kelima tantangan tersebut, maka tantangan ketiga akan menjadi perhatian utama dengan menciutnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat lingkungan hidup, sebagai isu tentang reklamasi pantai.

Isu menarik pada peringatan hari Bumi tahun ini adalah semakin maraknya unjuk rasa tentang rekla-

masi pantai yang dilakukan oleh berbagai macam komunitas masyarakat. Unjuk rasa bukan hanya di ibukota Negara Jakarta, tetapi sampai ke daerah-daerah dengan kota yang mempunyai pantai, terutama di Medan, Surabaya, Palangkaraya, sampai kota Makassar.

Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai garis pantai sekitar 1.974 km dengan luas wilayah 45.575 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa. Kota Makassar mempunyai garis pantai sekitar 52,8 km dengan luas wilayah 175,79 km persegi. Kota Makassar mempunyai garis pantai pesisir sepanjang 36,1 km, dan garis pantai pulau-pulau dan gusung sepanjang 16,7 km dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.

Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sepanjang itu mempunyai potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar untuk berbagai jenis ikan dengan nilai 620.480 ton/tahun dan 80.072 ton/tahun untuk zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Potensi perikanan ini akan bertambah besar jika daerah jelajah nelayan kita bertambah. Potensi ini sangat menjanjikan, tetapi pada saat yang bersamaan zona pantai selalu mengalami pengaruh internal dan eksternal, baik yang bersifat alami maupun karena aktivitas manusia akan memberikan tekanan bagi dinamika kawasan ini.

Faktor alami yang memberikan tekanan adalah gelombang, arus laut, pasang surut, sirkulasi angin, curah hujan, iklim dan aktivitas tektonik maupun vulkanik. Sedangkan aktivitas manusia yang memberikan tekanan pada kawasan pantai adalah kegiatan industri, perikanan pantai, pelabuhan, pertanian, pembangunan rumah sakit, pertambangan, permukiman dan penutupan alur sungai. Untuk permukiman, ka-

wasan pantai mulai dilirik pada saat manusia membutuhkan space untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa papan, pangan dan lainnya. Dapat dihitung dan diprediksi bagaimana biota pantai yang pada awalnya damai melakukan proses kehidupannya harus punah karena alasan mensejahterakan rakyat?

Untuk itu, diperlukan usaha terukur dan terencana mencari teknologi baru dalam pemanfaatan kawasan pantai yang selama ini masih terabaikan. Aspek lain adalah rencana besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan ikon Center Point of Indonesia (CPI). Pusat pertumbuhan ini mengakibatkan reklamasi seluas 157,23 hektar.

Investasi oleh pihak ketiga pasti menghitung nilai ekonomi yang bisa diperoleh. Biaya pengerukan jalur nelayan saja menelan biaya hampir Rp2M. Dalam jangka pendek, kegiatan reklamasi pantai dari aspek lingkungan secara kasat mata adalah berubahnya fungsi dan tatanan lingkungan berupa pertambahan rakyat, hamparan pasir pantai, kicaunya burung pemakan ikan dan lainnya menjadi hilang.

Proses ini tergantikan dengan kawasan ekonomi baru berupa pusat pertokoan, pusat bisnis, hotel, gedung pertemuan yang kesemuanya memberikan dampak pada mobilitas warga masyarakat untuk memperoleh akses.

Warga masyarakat memperoleh permukiman baru yang serba mewah dan hanya dapat dinikmati oleh warga dengan penghasilan tinggi dan para mereka yang juga sudah memiliki rumah dan tempat lainnya. Warga dengan penghasilan dibawah rata-rata yang pada umumnya dijadikan alasan untuk ditingkatkan

kesejahteraannya akan menjadi penonton di tempat mereka. Proses ini akan berlanjut dengan tahap bioteknologi tetapi dalam jangka akan membutuhkan biaya sosial yang lebih besar. Cost sosial ini yang di "rupiahkan", karena bisa dihitung hanya angka-angka di peta daerah. Warga yang (pengusaha dan kolektor) akan menikmati keuntungan yang melimpah sehingga akan merampas pendapatan penduduk, tetapi miskin secara realita akan menderita dan termarjinalkan.

Reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan UU 1 tahun 2014 tentang lolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan reklamasi pantai hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan segenap aspek dan tantangan terdahulu untuk meningkatkan nilai tambah aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Aspek inilah yang menjadi perisai dalam melindungi kawasan pesisir mana manusia merupakan faktor penentu di dalamnya yang hendak diberdayakan.

Pemberdayaan ekonomi berarti mencabut manusia dari mata pencaharian mereka dengan membentangkan dan meninggalkan yang berbeda-beda yang selama ini dilakukan.

Reklamasi pantai dakunya dilakukan dengan hati, bukan hanya sekedar ingin memunculkan agar Makassar menjadi Dunia. Kalau toh, Makassar berubah, maka perub itu menuju ke perub yang lebih baik berdasarkan hati nurani. (*)

email opini:
opini@tribun-timur.com
Panjang tulisan ± 5.000 kar

Aspek lain adalah rencana besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan ikon Center Point of Indonesia (CPI). Pusat pertumbuhan ini mengakibatkan reklamasi seluas 157,23 hektar